

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Kinerja Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah prestasi kerja atau pencapaian yang diterima sebuah perusahaan dalam menjalankan program/ kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Menurut Bastian (2006 : 274), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa “kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik.” Selain itu, *Output* yang dihasilkan organisasi sektor publik juga bersifat *intangibile*, sehingga diperlukan pengukuran non-finansial agar dapat mencerminkan *output* yang sebenarnya dihasilkan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 2). Menurut Ardila & Putri (2015) “kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Sumarjo (dalam Adhiantoko 2013) menjelaskan bahwa:

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

2.1.1.2 Indikator Kinerja

Menurut Bastian (2006: 267), “indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).”

- a. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/ peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

- e. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Menurut (Mardiasmo 2009: 128) peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain:

- a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi;
- b. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan;
- c. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial;
- d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan;
- e. Untuk menunjukkan standar kinerja;
- f. Untuk menunjukkan efektivitas;
- g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
- h. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya;

2.1.1.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/ kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordawan dan Hertianti). Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Nugrahani, 2007).

Manurut Stout (1993) dalam *Performance Measurement Guide* (dalam Bastian, 2006: 275): “Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi

(mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.”

Mardiasmo (2009: 121) menjelaskan bahwa:

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen yang merupakan proses mencatat dan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi perusahaan melalui hasil-hasil yang ditampilkan baik berupa produk, jasa maupun proses (Purnamasari, Suwendra dan Cipta, 2014). Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2009: 122) Tujuan sistem pengukuran kinerja secara umum adalah:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*);
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi;
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*; dan sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah di capai. Menurut Mahmudi (2010) Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan, yaitu semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemda, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
- a. Belanja aparatur daerah
 - b. Belanja Pelayanan Publik
 - c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:
- a. Sumber penerimaan daerah, yaitu:
 - Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
 - Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
 - Transfer dari dana cadangan
 - b. Sumber Pengeluaran daerah, yaitu:
 - Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
 - Penyertaan modal

- Transfer ke dana cadangan
- Sisa lebih anggaran tahun sekarang

b. Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Maupun Laporan Arus Kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002).

Menurut Wachid (2014: 2) “ Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

Menurut Mahmudi (2010) Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Berdasarkan data pendapatan daerah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan beberapa analisis rasio keuangan, diantaranya: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan dan Rasio Keserasian Belanja.

2.1.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Adapun skala yang digunakan untuk mengukur Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber: Wulandari (dalam Adhiantoko 2013)

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

2.1.3.2 Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Keuangan daerah memiliki pola hubungan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25 – 50%	Konsultatif
Sedang	50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	75 – 100%	Delegatif

Sumber: Halim (dalam Adhiantoko 2013)

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio kemandirian dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

2.1.3.3 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Adapun rumus menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas Menurut Mahmudi (2010) adalah:

1. Jika diperoleh nilai < 75% berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai 75% - 89% berarti kurang efektif
3. Jika diperoleh nilai 90% - 99% berarti cukup efektif
4. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektif
5. Jika diperoleh nilai > 100% berarti sangat efektif.

2.1.3.4 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%.

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim (dalam Adhiantoko 2013)

Adapun rumus menghitung Rasio Efisiensi Keuangan adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.1.3.5 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan mengenai hal-hal seputar kinerja keuangan organisasi sektor publik dengan menggunakan rasio keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pramono (2014), yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Surakarta).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 serta untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemkot Surakarta dalam mengelola sumber dayanya. Hasil penelitian ini adalah kinerja keuangan pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian.

2. Sijabat, Choirul Saleh dan Abdul Wachid (2012), dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan keuangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan keuangan kota Malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu.
3. Rudiyanto (2015), dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada daerah kab/kota di provinsi DIY dan Banten).” Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah Kab/ kota tersebut. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kab/ kota di provinsi DIY masih tergolong kurang baik. Kemampuan keuangan daerah kab/ kota di provinsi DIY masih tergolong dalam kategori rendah.

4. Adhiantoko (2013), dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bloro (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bloro tahun 2007-2011)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Bloro tahun 2007-2011 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bloro dari rasio derajat desentralisasi fiskal masih sangat kurang, rasio kemandirian keuangan masih dalam pola instruktif, Rasio Efektivitas sudah efektif, rasio efisiensi masih kurang efisien, dan rasio keserasian belanja dikategorikan masih belum seimbang.
5. Muhibtari (2014), dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini bahwa pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria instruktif, tingkat derajat desentralisasi fiskal masih kurang, untuk efektivitas termasuk sangat efektif dan tingkat efisien tergolong sangat efisien, rasio keserasian menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang.

Adapaun ringkasan dari penelitian terdahulu akan disimpulkan dalam tabel

berikut:

Tabel 2.4
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Surakarta)	Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pemkot surakarta masih kurang di bidang kemandirian dan aspek keserasian. Namun untuk tingkat efisiensi dan efektivitasnya sudah berjalan dengan baik.
2.	Sijabat, Choirul Saleh dan Abdul Wachid (2012)	Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)	Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu, selain itu untuk tingkat kemandirian keuangan mengalami kecenderungan peningkatan yang positif.
3.	Rudiyanto (2015)	Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada daerah kab/kota di provinsi DIY dan Banten)	Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kab/ kota di provinsi DIY masih tergolong kurang baik. Kemampuan keuangan daerah kab/ kota di provinsi DIY masih tergolong dalam kategori rendah.
4.	Adhiantoko (2013)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bloro (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini yaitu dari derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat kurang, dari rasio kemandirian masih

		Blora tahun 2007-2011)		tergolong sangat rendah, dari rasio efektivitas PAD diketahui bahwa keuangan DPPKAD tidak berjalan efektif, dari rasio efisiensi dapat dikatakan kurang efisien, dilihat dari rasio keserasian dikatakan masih belum stabil dari tahun ke tahun
5.	Muhibtari (2014)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	Kinerja Keuangan	Hasil dari penelitian ini bahwa pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria instruktif, tingkat derajat desentralisasi fiskal masih kurang, untuk efektivitas termasuk sangat efektif dan tingkat efisien tergolong sangat efisien, rasio keserasian menunjukkan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang.

2.3 Kerangka Berpikir

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk melihat serta menilai telah sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang fokus operasionalnya hanya pada laba saja, tetapi organisasi sektor publik lebih kepada meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Penelitian ini menggunakan lima macam rasio untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten simalungun, yaitu: Analisis rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang dihitung dengan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio kemandirian

Keuangan Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah. Rasio Efektivitas PAD yang dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dihitung dengan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Kerasian yang merupakan gambaran bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Efektivitas Daerah?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Kerasian?